

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi-studi teoritis tentang hubungan Islam dan politik yang dilakukan para ahli keislaman, kebanyakan berada dalam prespektif hubungan Negara dan masyarakat sehingga khasanah studi yang lebih kecil, yang membahas tentang hubungan interaksional antara ajaran Islam dengan tindakan politik kurang disentuh, walaupun ada masih sangat sedikit.

Teori hubungan politik dan agama di dalam Islam, antara lain dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan, seperti yang telah dikonsepsikan oleh para pemilik politik mazhab Syi'ah, Al-Maududi, Al - Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan beberapa tokoh yang lain.

Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan, wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Oleh karena itu menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan karena kedaulatan itu memang berasal dari dan berada ditangan Tuhan. Pandangan inilah yang juga disebut sebagai fundamentalis Islam.¹

¹ Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai : Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, Surabaya : LKiS, 2007, halaman 23 - 24

Menurut Al-Mududi syari'ah Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik antara agama negara. Syari'ah merupakan totalitas pengaturan kehidupan manusia yang tidak mengandung kekurangan sedikitpun. Negara harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan (Khalifah), dan menerapkan musyawarah.²

Pemikiran politik yang memandang hubungan agama dan negara bersifat *simbiotik*, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar pijakan kekuatan moral sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol, sementara disisi lain agama memerlukan negara sebagai sarana untuk mengembangkan agama itu sendiri.³

Menurut Al- Ghozali, memilih kepala negara bukanlah keharusan rasional, melainkan keharusan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesejahteraan *ukhrawi* harus dilakukan melalui pengalaman dan penghayatan agama di dunia secara benar. Ini yang dijadikan argumentasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua hal yang saling membutuhkan.⁴Dalam konteks keIndonesiaan agama dan negara dapat di bagi menjadi tiga katagori kelompok akomodatif, kelompok Moderat dan kelompok Idealis Radikal.⁵

² Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1995, halaman 166

³ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : ISIS, 1994, hlm.8

⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press, 1995, hlm. 76

⁵ Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai : kontruksi Social Berbasis Agama*, Surabaya : LKiS,

Ahlussunnah adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Mereka mempunyai pendapat tentang masalah agama, baik yang fundamental (*Ushul*) maupun Devisional (*Furu*).⁶

Dari definisi ini jelas, bahwa Ahlussunnah Wal-Jama'ah itu tidak hanya terdiri dari satu kelompok aliran, tetapi ada beberapa sub aliran, ada beberapa faksi didalamnya. Istilah Ahlussunnah Wal-Jama'ah ini menjadi rebutan banyak kelompok, masing masing membuat klaim bahwa Ahlussunnah Wal-Jama'ah.

Dalam Ilmu Kalam, istilah Ahlussunnah Wal-Jama'ah ini banyak dipakai sejak zaman shahabat, sampai pada generasi-generasi berikutnya. Penyebutan Ahlussunnah Wal-Jama'ah ini digunakan untuk membedakan kelompok ini dengan kelompok yang lainnya, dan para Imam Mazhab Fiqih; seperti Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam As Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ibnu Hambal (w. 141 H) dikenal sebagai tokoh-tokoh Ahlussunnah, sebelum munculnya Imam Al-Maturudi dan Imam At-Thohawi sehingga tokoh Ilmu Kalam dari kalangan Ahlussunnah pada abad 3 H.⁷

Konsep bangsa seperti yang difahami dalam wacana politik sekarang memang termasuk hal baru, artinya muncul pada era kehidupan modern setelah revolusi Prancis pada tahun 1789 M.

⁶ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlusunnah Wal Jama'ah : Dalam Persepsi Dan Tradisi NU*, Jakarta : Lantarabora Press, 2004, hlm. 3

⁷ Ibid. hlm. 4

Kembali pada masalah kebangsaan dalam tradisi Ahlussunnah Wal - Jama'ah, yang dulunya masalah ini lebih di fahami sebagai arti praktis dan konsep keumatan. Umat dalam konsep tersebut mempunyai arti sekumpulan orang-orang yang disatukan oleh kesamaan keyakinan agama. Dengan pengertian ini maka masalah ras, budaya, bahasa dan wilayah tempat tinggal tidak membatasi pengertian keumatan tersebut. Meski demikian konsep keumatan ini tidak menghalangi kehidupan yang plural (majemuk) antara komunitas Islam dengan komunitas lainnya dalam wilayah satu negara selama ini.

Sebagai kelompok mayoritas, pola pikir politik Sunni biasanya sangat berpihak pada pemerintah yang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Jarang pula pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah.⁸ Pemikiran demikian dapat dilacak akarnya dari pandangan berupa ahli politik dan ketatanegaraan Sunni mengenai sumber kekuasaan dan kewenangan penguasa. Kalangan Sunni biasanya menganggap bahwa kekuasaan kepada negara berasal dari Tuhan.

Pandangan ini mendapat pembenaran dari Ibnu abi Rabi' pemikir Sunni yang hidup pada abad ke-3 H/ 9 M pada zaman Khalifah Bani Abbas yang kedelapan. Ibnu abi Rabi' mengungkapkan legitimasi dalam Al- Qur'an Surat al-An'am 6 : 165 dan An- Nisa', 4 : 59.

⁸ Ibnu Timiyah, *Al- Siyasa al- Syar'iyah fi Islah al- Ro' I wa al- Ra'iyah*, Bairut Dar al- Afaq, 1983.hlm 162

“Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi ini dan Dia pula yang meninggikan sebagian kalian atas sebagian lainnya beberapa derajat” (QS. Al- An’am : 165).⁹

Surat Al-Nisa’

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul-Nya serta para pemimpinnya di antara kalian” (QS. Al- Nisa’, 4 : 59).¹⁰

Menurut Ibnu abi Rabi’ kedua ayat diatas merupakan penegasan Allah SWT bahwa ia telah memberikan keistimewaan kepada para raja dengan segala keumatan dan memperkokoh kedudukan mereka di buminya, oleh karena itu Allah mempercayaka kepada mereka untuk memimpin hamba-hambanya yang lain. Di samping itu, Allah juga mewajibkan kepada para ulama untuk menghormati, mengagungkan dan menaati perintah mereka.¹¹

Dalam teori Al Ghozali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau basis basis bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau penguasa penjaga bagi pelaksanaan agama.¹²

Sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa pada tahun 1916 M. K.H.A. Wahab Hasbullah dan kiai-kiai lainnya telah membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Nadhlatul Wathan di Surabaya, yang bergerak dalam upaya

⁹ DEPAG RI, *Al- Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta : UI Press, 1990, 47 - 48

¹⁰ Ibid

¹¹ Munawir Sadzali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1990, hal. 47 – 48

¹² Al- Ghozali, *Al- Iqtishab fi al- I’tiqad*, Mesir : Maktabah al- Jund, 1972, hal. 198 - 199

pencerdasan bangsa. Tidak berlebihan apabila orang menilai bahwa Nadhlatul Wathan merupakan tonggak kebangkitan nasionalisme masyarakat Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah di Indonesia.

Perlu kiranya kita membuat refleksi pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang majemuk ini, agar memudahkan memberi gambaran tentang proses kesadaran berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini.¹³

Oleh karena itu, maka perlu adanya kendaraan untuk dijadikan sebagai alat untuk menuju kepada cita-cita luhur guna menciptakan masyarakat madani, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang didirikan melalui sebuah akad para ulama merupakan wadah untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia akan sebuah partai politik yang mampu mengartikulasikan aspirasi mereka melalui para kiai untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) melihat bahwa saat ini bangsa Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi, belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada konsolidasi demokrasi yang ditunjukkan oleh adanya ketaatan pada konstitusi dan penegakan hukum secara serius akibat proses demokrasi kerap kali berjalan tidak seiring itu sendiri bersifat elitis.¹⁴

¹³ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlusunnah Wal Jama'ah : Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Jakarta : Lantarabora Press, 2004, hal. 343 - 344

¹⁴ Ma'ruf Amin, KH. *Kenapa Harus PKNU*, Jakarta : DPP PKNU, 2007, hal. 24

Fenomena tersebut merupakan awal pemikiran penulis yang melatar belakangi pembahasan masalah ini dalam sebuah Skripsi yang berjudul :

“KONSEP AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH (ASWAJA) DALAM POLITIK PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU). (IMPLIKASI POLITIK ISLAM AHLUSUNNAH WAL JAMA’AH DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA NKRI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada yaitu :

1. Bagaimana pandangan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap konsep Ahlusunnah Wal Jama’ah ?
2. Bagaimana konsep politik Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dalam berbangsa dan bernegara (NKRI) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui prinsip-prinsip dasar pandangan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap konsep Ahlusunnah Wal Jama’ah.
2. Untuk mengetahui pandangan konsep politik Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap konsep politik Ahlusunnah Wal Jama’ah dalam berbangsa dan bernegara (NKRI).

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Penulisan ini juga sebagai tambahan wawasan dan referensi Studi politik Islam, khususnya tentang politik Islam di Indonesia.
2. Memberikan pemaparan dan gambaran yang jelas tentang pandangan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) terhadap konsep politik Ahlusunnah Wal Jama'ah dalam berbangsa dan bernegara (NKRI).

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan konsep penelitian diatas dan guna membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka kami memberikan gambaran sebagai berikut :

1. a. *As-Sunnah* secara bahasa “*Sanna-Yasinnu*” yaitu yang disunnahkan. *As-Sunnah* juga mempunyai arti *At-Thariiqah* yaitu jalan atau pandangan hidup. Sedangkan secara Istilah yaitu jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan para shahabatnya, baik berkenaan dengan ilmu, A'qidah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan. *Jama'ah* secara bahasa *Jama'a* yang artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekati sebagian dengan sebagian yang lain. Sedangkan secara Istilah seluruh kaum muslimin.
- b. Ahlusunnah Wal Jama'ah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para shahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka baik dalam hal aqidah, perkataan, maupun perbuatan.¹⁵

¹⁵ Abdullah bin Abdul Hamid, *Intisari 'Aqidah : Ahlusunnah Wal Jama'ah*, Jakarta : Pustaka Imam Assyafi'I 2006, hal. 51 – 56

2. PKNU adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama, yang didirikan pada tanggal 29 Syawal 1427 Hijriyah atau bertepatan dengan 21 November 2006 Masehi di Langitan, Tuban, Jawa Timur.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian studi kualitatif, dimana penelitian tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya saja tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang berhasil direkam. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial sebagai suatu fenomena dan ini sejalan dengan pengertian penelitian kualitatif, yaitu bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada aspek realitas sosial dan tingkah laku manusia.¹⁷

2. Subjek Penelitian

Para pihak yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah :

Para pengurus PKNU yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Meliputi :
Ketua PKNU dan jajarannya, Dewan Mustasyar PKNU.

3. Sumber Data

¹⁶ AD-ART *Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU):BAB I Pasal 1*, DPP PKNU, 2007

¹⁷ Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya, 2001, hal. 83

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara.¹⁸ Dalam hal ini, dengan cara penelitian langsung di kantor PKNU wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang menjadi data primer disini adalah Ketua PKNU Provinsi Jawa Timur dan pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang sifatnya tambahan sebagai unsur kelengkapan penulisan. Sumber data sekunder dapat diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian dan dapat diperoleh dari literatur yaitu AD-ART PKNU, Ketetapan- ketetapan MUKERNAS PKNU, ataupun hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter diantaranya buku buku arsip PKNU, literatur politik maupun makalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain yaitu :

¹⁸ Gabriel Amin Silalahi. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo : CV, Citramedia, 2003

- a. Metode Observasi, yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang di selidiki¹⁹ dengan metode ini penulis menggunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan seluk-beluk Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
- b. Metode Interview, yaitu metode yang pelaksanaannya melalui proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik sehingga dengan demikian dapat mendengarkan sendiri suaranya,²⁰ metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan seluk-beluk Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
- c. Metode Dokumenter, adalah suatu teknik pengumpulan data terhadap data yang tertulis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data berkaitan selukbeluk Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari empat bab dan disertai dengan sub-sub bab dan beberapa lampiran secara sistematis pembahasan ini yaitu :

¹⁹ Trisno Hadi. *Metodologi Research*. Jakarta : Rineka Cipta, 1980, hal. 136

²⁰ Winardi. *Pengantar Metodoogi Research*. Bandung : Alumni, 1986, hal. 117

BAB I

PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

BAB II

KONSEP AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH :DINAMIKA POLITIK

ISLAM

Dalam bab ini membahas tentang latarbelakang berdirinya Ahlussunnah wal-jamaah, prinsip-prinsip perjuangan ahlussunnah wal-jamaah, ruang lingkup negara bangsa, karakteristik ahlussunnah wal-jamaah dalam politik, konsep politik Ahlusunnah Wal Jama'ah yang meliputi masalah Aqidah, Tradisi Budaya, Kepemimpinan dan Wawasan Kebangsaan dan Kenegaraan. Serta sikap-sikap politik Islam ala Ahlusunnah Wal Jama'ah yang meliputi sikap At- Tawasuth (Moderat), At- Tsamuh (Toleran) dan At- Tawazun (Harmoni).

BAB III
PROFIL PKNU DAN PELAKSANAAN AHLUSSUNNAH WAL-JAMAAH
DALAM POLITIK NKRI

profil PKNU yang meliputi Latar Belakang sosiologis berdirinya PKNU, Visi dan Misi PKNU, Prinsip-prinsip dasar PKNU, Susunan Kepengurusan PKNU dan butir-butir kesepakatan rapat Tim 17 pendiri PKNU, pelaksanaan politik PKNU dalam politik NKRI.

BAB IV
ANALISIS

Analisis pelaksanaan politik Islam ahlussunnah wal-jamaah oleh PKNU di NKRI yang meliputi analisis terhadap pandangan PKNU dalam politik ahlussunnah wal-jamah, analisis terhadap politik ahlussunnah wal-jamaah di NKRI.

BAB V
PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran- saran